

## Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal

Antonius Ary Setyawan<sup>1\*</sup>, Eva Desembrianita<sup>2</sup>, Muhammad Hery Santoso<sup>3</sup>, Syahril<sup>4</sup>, Rieneke Ryke Kalalo<sup>5</sup>

<sup>1</sup>STIKOM Yos Sudarso Purwokerto, Jl. SMP 5, Windusara, Karangklesem, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53144

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatera No.101, Gn. Malang, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121

<sup>3</sup>STMIK Widya Utama, Jl. Sunan Kalijaga, Dusun III, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53146

<sup>4</sup>Universitas Islam Depok, Jl. H. Maksum No. 23 RT. 04/02, Sawangan Baru, Depok, Jawa Barat, 16511  
Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Jl. Raya Tomohon Talete 2, Kota Tomohon, Sulawesi Utara

E-mail: [arysetpr@gmail.com](mailto:arysetpr@gmail.com)

\*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 04 July 2025

Revised: 10 July 2025

Accepted: 16 July 2025

#### Kata Kunci

Pemberdayaan Masyarakat,  
Kemandirian, Ekonomi Lokal

#### Keywords

Community Empowerment,  
Independence, Local  
Economy



### ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep dari teori Jim Ife yang menjadi landasan untuk memahami dan menganalisis dampak pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah Pemberdayaan masyarakat adalah kunci strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan. Melalui strategi yang efektif seperti peningkatan kapasitas SDM (pelatihan keterampilan teknis, pengembangan kemampuan manajerial, pendidikan kewirausahaan, dan pelatihan pengelolaan keuangan), akses terhadap sumber daya (modal, teknologi, dan pasar), penguatan kelembagaan ekonomi lokal, pengembangan potensi lokal, serta partisipasi dan kolaborasi multisektor, masyarakat tidak hanya mampu mengelola sumber daya ekonominya secara mandiri, tetapi juga membangun struktur sosial dan kelembagaan yang kuat dan tangguh.

The purpose of this study is to determine the role of community empowerment in increasing local economic independence. The concept used in this study is the concept of Jim Ife's theory which is the basis for understanding and analyzing the impact of development on community empowerment. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, documentation and literature studies. The results of this study are that community empowerment is a strategic key in creating sustainable local economic independence. Through effective strategies such as increasing human resource capacity (technical skills training, managerial ability development, entrepreneurship education, and financial management training), access to resources (capital, technology, and markets), strengthening local economic institutions, developing local potential, and multi-sector participation and collaboration, communities are not only able to manage their economic resources independently, but also build strong and resilient social and institutional structures.



access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

**How to Cite:** Antonius Ary Setyawan, et al (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal . 4(1), 1494-1503 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>

## PENDAHULUAN

Masalah utama yang dihadapi oleh negara yang memiliki banyak penduduk seperti Indonesia adalah kemiskinan. Indonesia memiliki kasus kemiskinan paling tinggi, berada di urutan ke-5 di ASEAN dalam daftar negara yang menghadapi krisis kemiskinan. Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, angka kemiskinan tetap tinggi, mencakup kedua sektor perkotaan dan perdesaan. Meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program, seperti bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan pekerjaan, dan menawarkan program pelatihan kejuruan untuk masyarakat. Namun pengurangan angka kemiskinan masih menjadi tantangan yang sulit diatasi (Achmad, 2024).

Kebijakan pengentasan kemiskinan sebenarnya tidak jauh dari pembangunan sumber daya manusia (masyarakat) itu sendiri, yang mengandung arti sebagai usaha sadar dan terarah yang dijalankan oleh dan untuk masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan mereka (Mala et al., 2024). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat digunakan sebagai salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan perekonomian tersebut.

Pemberdayaan merupakan salah satu konsep alternatif dalam meningkatkan kemampuan dan martabat agar terlepas dari permasalahan, seperti kurangnya inovasi, kemiskinan, kreativitas, keterbelakangan, dan aksesibilitas yang mengacu pada suatu kelompok atau individu. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat pada mulanya merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek. Konsep ini menampakkan kecenderungan bahwa pemberdayaan menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya (Pangestuti et al., 2018).

Pemberdayaan adalah sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya (Endah, 2020).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mengontrol kehidupan, menggunakan sumber daya lokal secara optimal, serta mengambil keputusan yang berdampak positif bagi komunitas. Urgensi pemberdayaan masyarakat semakin meningkat dalam era pembangunan berkelanjutan, terutama karena peran aktif masyarakat menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan (Hilmi Nur Huda Al Mubaroq et al., 2025).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan mereka, sehingga dapat mencapai kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pada konteks daerah, pemberdayaan ini sangat relevan mengingat banyak daerah yang memiliki potensi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemberdayaan masyarakat ini berfokus pada bagaimana potensi lokal dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kemandirian masyarakat (Ristanti et al., 2025).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat pemerintah akan melakukan upaya dan tindakan untuk menjadikan masyarakat bukan sebagai objek suatu kebijakan tetapi sebagai pelaku kebijakan. Untuk menjadikan peran masyarakat sebagai pelaku diperlukan partisipasi yang kuat dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam setiap kebijakan pemerintah. Dengan demikian tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat maka program dan kegiatan pemerintah tidak akan berjalan efektif dan tepat sasaran (Ndraha & Uang, 2018). Karena pemberdayaan masyarakat tentunya akan melibatkan seluruh masyarakat, baik dalam kepengurusan maupun ketenagakerjaan untuk berbagai program pemberdayaan sampai terjadi kemandirian masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul (Hidayatullah & Suminar, 2021).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup perbaikan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Sinergi antara peningkatan ekonomi dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya merupakan faktor penentu untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal secara keseluruhan.

Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan ekonomi dari pemerintah atau pihak luar, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berdampak positif bagi komunitas.

Sesuai dengan visi misi pemberdayaan masyarakat, yang dimana visi pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat. Kemudian misi pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian, secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan (Lusa & Supriatna, 2020).

Konsepsi pemberdayaan masyarakat ala kemandirian ekonomi lokal merekomendasikan agar pembangunan dilaksanakan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal dengan mengacu kepada karakteristik spesifik yang dimiliki. Selain memanfaatkan sumber daya, proses yang terjadi dalam konteks lokal harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi dasar pembangunan dan penguatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka wujud kemandirian ekonomi lokal di masyarakat tercipta jika masyarakat mampu memanfaatkan segenap potensi atau sumber daya yang ada disekitarnya (Mulyadi, 2017).

Kemandirian ekonomi lokal adalah suatu kondisi di mana suatu wilayah memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara optimal dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya sendiri, tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pihak luar. Kemandirian ini mencerminkan kekuatan ekonomi yang bersumber dari dalam wilayah tersebut, baik dari segi produksi, distribusi, konsumsi, maupun, tata kelola ekonomi yang partisipatif dan inklusif.

Kemandirian ekonomi lokal dapat didefinisikan sebagai daerah yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada pemerintah maupun pihak luar (Hawa et al., 2022). Kemandirian ekonomi lokal berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mandiri dalam mengembangkan ekonomi lokal, sehingga tidak bergantung pada bantuan dari pihak luar (Asnuryati, 2023).

Kemandirian ekonomi lokal ditandai oleh adanya usaha atau pekerjaan yang dikelola secara ekonomis, rasa percaya diri dalam aktivitas ekonomi, kegiatan ekonomis yang ditekuni dalam jangka waktu lama, serta sikap berani untuk mengambil risiko dalam aktivitas ekonomis. (Febrianty, 2024)

Kemandirian ekonomi lokal adalah aspek penting dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, terutama mengingat potensi besar yang dimiliki oleh beragam wilayah pedesaan dalam hal sumber daya alam. Sejumlah strategi telah diidentifikasi untuk mengatasi hambatan dan mendorong kemandirian ekonomi lokal, antara lain pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), peningkatan pengelolaan dana desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan perdagangan (Septiya Fahmi Rezi & Ali, 2024).

Peneliti dalam hal ini menggunakan teori dari Jim Ife yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian. Jim Ife menjelaskan bahwa Upaya penguatan kelompok masyarakat dapat dilakukan melalui tiga strategi: (1) Memperkuat pelayanan melalui perencanaan dan kebijakan atau mengubah struktur dan kelembagaan yang menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya. (2) Pemberdayaan melalui aksi sosial politik yang dilakukan melalui perjuangan dan gerakan politik untuk membangun kekuasaan yang efektif. (3) pemberdayaan melalui pendidikan dan pengakuan terhadap proses pendidikan dalam berbagai aspek penting pendidikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Yaitu Suatu peristiwa, kejadian atau gejala digambarkan dan dijelaskan dalam bentuk penjelasan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami pentingnya banyak individu atau kelompok orang yang disebabkan oleh permasalahan sosial.

Peneliti menganalisis dan menyelidiki pemberdayaan yang terjadi di suatu wilayah untuk meningkatkan perekonomian wilayah dengan program yang diberikan oleh pemerintah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah observasi khususnya wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Ada dua kategori pengumpulan data yang dilakukan peneliti, pertama adalah data primer yang diperoleh secara langsung yaitu diperoleh melalui observasi lapangan dan pertanyaan langsung kepada aparat desa, LSM, dan masyarakat lokal. Kedua adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber yang ada, pengumpulan data sekunder dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan mengumpulkan dokumen-dokumen relevan yang mendukung topik penelitian dibahas. Pada penelitian ini peneliti menganalisis dan mendalami pemberdayaan yang terjadi di suatu wilayah sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi lokal dengan program-program yang diberikan oleh pemerintah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai suatu proses, pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan yang meningkatkan kekuatan atau keberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada kondisi atau hasil yang dicapai oleh perubahan sosial yaitu orang yang memiliki kekuasaan, wewenang atau pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, baik fisik, finansial maupun sosial, seperti percaya diri, berani mengungkapkan keinginan, mata pencaharian yang jelas, partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, dan kemandirian dalam memenuhi tanggung jawab hidupnya (Halil, 2022).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan masyarakat, khususnya kelompok-kelompok lemah dan termarginalkan, agar mereka mampu menentukan nasib sendiri secara mandiri. Pemberdayaan tidak sekadar memberikan bantuan atau intervensi dari luar, tetapi lebih kepada upaya mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas internal masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan harus partisipatif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat secara ekonomi mengacu pada upaya yang disengaja dan terorganisir untuk memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat pada tingkat individu dan kelompok guna menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup. Adapun untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada kelompok yang lebih lemah dan rentan dalam mencapai kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat biasanya ditujukan kepada mereka. Kebutuhan tersebut terdiri dari pangan, sandang, dan papan. Selain dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, masyarakat juga perlu memiliki akses terhadap sumber pengembangan pendapatan yang produktif dan memperoleh produk serta layanan berkualitas tinggi yang mereka perlukan (Munjiat et al., 2023).

Dalam konteks desa, aspek pemberdayaan telah diatur melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 1 pada ayat 12. Peraturan perundangan tersebut mengatur bahwa model pemberdayaan masyarakat di desa merupakan sebuah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan serta asistensi yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan bagi masyarakat desa. Hal ini menandakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang didasari atas peningkatan kualitas individu dari masyarakat itu sendiri (Firman, 2021).

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia, dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil, dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka (Karsidi, 2002).

Pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mendorong kemandirian di berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Aksi ini telah menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan ekonomi di masyarakat. Ketika masyarakat diberi kesempatan, pengetahuan, dan sumber daya untuk mengambil peran aktif, mereka dapat menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan positif dalam komunitas. Pemberdayaan masyarakat membantu meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dengan memungkinkan individu dan kelompok untuk mengembangkan keterampilan.

Kemandirian ekonomi lokal adalah kondisi ketika suatu daerah atau komunitas mampu mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, dan budaya yang dimilikinya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya tanpa terlalu bergantung pada pihak eksternal, baik dari pemerintah pusat maupun dari pelaku ekonomi luar daerah. Meningkatnya kemandirian ekonomi lokal dapat memperkuat orientasi suatu daerah guna pertumbuhan lebih baik sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut secara merata (Hamdan, 2018).

Kemandirian ekonomi oleh beberapa kalangan dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat kontemporer saat ini. Kemandirian ekonomi juga sebagai salah satu usaha untuk menciptakan kecukupan kebutuhan pokok dalam kehidupan. Dalam konteks kontemporer saat ini, konsep dasar tentang kemandirian ekonomi banyak diterapkan sebagai upaya alternatif untuk mengatasi berbagai problematika ekonomi di tengah masyarakat. Harapannya adalah agar terbentuknya masyarakat dalam skala mikro menuju kesejahteraan di tengah gempuran pasar global dan liberalisasi ekonomi (Adlan, 2024).

Kemandirian ekonomi lokal memiliki peranan krusial dalam pembangunan di tingkat nasional dan regional. Hal ini mencerminkan kapasitas daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat setempat tanpa bergantung terlalu banyak pada bantuan eksternal. Secara nasional, daerah yang mandiri secara ekonomi dapat berfungsi sebagai penopang perekonomian negara dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi urbanisasi yang berlebihan, serta menjaga keseimbangan ekologi melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Pada tingkat regional, kemandirian ekonomi daerah membantu dalam pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Daerah yang mandiri dapat meningkatkan kualitas hidup warganya, menurunkan angka kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Oleh karena itu, memperkuat kemandirian ekonomi daerah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan di tingkat nasional dan regional.

Kemandirian ekonomi lokal tidak akan tercapai tanpa proses pemberdayaan yang terarah dan inklusif. Masyarakat yang diberdayakan akan memiliki kemampuan untuk mengenali potensi lokal, mengembangkan keterampilan produktif, mengakses sumber daya ekonomi, dan mengambil keputusan secara kolektif. Misalnya, ketika kelompok masyarakat mendapatkan pelatihan pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan bernilai tambah, serta didukung oleh akses pasar dan kelembagaan ekonomi lokal seperti koperasi atau BUMDes, mereka tidak hanya menjadi lebih produktif tetapi juga lebih mandiri dalam menentukan arah usaha dan kesejahtraannya.

### **Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal**

Berikut adalah beberapa strategi pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal, yaitu :

#### **1. Peningkatan Kapasitas SDM**

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan individu dan kelompok dalam memahami, mengelola, serta memanfaatkan potensi lokal secara optimal untuk menciptakan kemandirian ekonomi. penguatan kapasitas masyarakat perlu diarahkan pada penguasaan berbagai keterampilan strategis, seperti pelatihan keterampilan teknis, pengembangan kemampuan manajerial, pendidikan kewirausahaan, dan pelatihan pengelolaan keuangan.

##### **a. Pelatihan Keterampilan Teknis**

Pelatihan keterampilan teknis menjadi langkah awal dalam membekali masyarakat agar mampu menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang baik dan sesuai kebutuhan pasar.

Dengan penguasaan keterampilan teknis, masyarakat mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses produksi. Mereka dapat menghasilkan produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan konsumen, baik di pasar lokal maupun pasar yang lebih luas. Keterampilan teknis ini juga membuka peluang untuk berinovasi, menciptakan variasi produk baru, serta memanfaatkan bahan baku lokal secara optimal.

b. Pengembangan Kemampuan Manajerial

Selain keterampilan teknis, kemampuan manajerial sangat penting dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Kemampuan manajerial yang baik akan membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang tepat, menghindari pemborosan, serta menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Lebih jauh, kemampuan ini juga penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan usaha, terutama bagi kelompok usaha bersama seperti koperasi atau BUMDes.

c. Pendidikan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan bukan hanya mengajarkan bagaimana mendirikan dan menjalankan usaha, tetapi juga membangun sikap mental yang tangguh, berani mengambil risiko, mampu membaca peluang pasar, dan terus belajar dari kegagalan. Melalui pendidikan kewirausahaan, masyarakat akan lebih siap untuk tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga menjadi pencipta lapangan kerja. Ini sangat penting dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, di mana penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya disandarkan pada sektor formal. Kewirausahaan lokal yang berkembang akan menjadi penggerak utama roda ekonomi desa atau wilayah, terutama jika didukung oleh ekosistem usaha yang kondusif dan berbasis potensi lokal.

d. Pelatihan Pengelolaan Keuangan

Salah satu hambatan utama dalam keberlanjutan usaha masyarakat adalah lemahnya literasi keuangan. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki catatan keuangan yang baik, mencampuradukkan keuangan pribadi dan usaha, serta tidak memahami pentingnya perencanaan keuangan dan manajemen risiko. Oleh karena itu, pelatihan pengelolaan keuangan menjadi sangat penting.

Pelatihan pengelolaan keuangan dapat mencakup pembuatan laporan keuangan sederhana, penghitungan keuntungan dan kerugian, perencanaan investasi, pengelolaan hutang, dan strategi menabung atau membangun cadangan dana. Literasi keuangan yang baik akan membantu masyarakat dalam menjaga stabilitas usahanya, menghindari ketergantungan pada utang konsumtif, serta memperkuat akses ke lembaga keuangan formal seperti koperasi simpan pinjam, BPR, atau bank mikro.

2. Akses Terhadap Sumber Daya

Akses terhadap sumber daya merupakan elemen yang sangat fundamental. Tanpa adanya akses yang memadai dan adil terhadap berbagai sumber daya strategis baik itu modal, teknologi, informasi, maupun pasar usaha kecil dan kegiatan ekonomi lokal tidak akan dapat berkembang secara optimal.

Kemudahan akses terhadap sumber daya adalah kunci strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi lokal yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Akses terhadap modal usaha memungkinkan masyarakat untuk membangun dan memperluas usahanya, akses terhadap teknologi mendorong efisiensi dan kualitas produksi, sementara akses terhadap pasar membuka ruang yang luas untuk pertumbuhan ekonomi. Ketiganya, jika dikelola secara terpadu dan partisipatif, akan menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang mandiri dan mampu menjadi penopang kesejahteraan masyarakat dari tingkat bawah ke atas.

3. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Lokal

Penguatan kelembagaan ekonomi lokal merupakan kunci utama dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan adanya lembaga yang solid dan berfungsi secara efektif, masyarakat dapat bergerak secara kolektif, memperkuat posisi tawar, memperluas jejaring usaha, serta memaksimalkan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan. Kelembagaan seperti koperasi, KUB, dan BUMDes bukan hanya alat ekonomi, melainkan juga sarana sosial yang membentuk solidaritas, partisipasi, dan kesetaraan dalam proses pembangunan ekonomi lokal. Oleh karena itu, investasi dalam penguatan kelembagaan lokal sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur atau pemberian modal, karena ia menyentuh aspek struktur sosial dan sistem ekonomi dari bawah ke atas.

#### 4. Pengembangan Potensi Lokal

Pengembangan potensi lokal merupakan salah satu pendekatan kunci dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Potensi lokal merujuk pada berbagai sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang khas dan tersedia di suatu wilayah tertentu.

Melalui pengolahan produk atau jasa yang bersumber dari kekayaan budaya, alam, dan sosial setempat, masyarakat dapat menciptakan ekonomi yang kuat sekaligus menjaga identitas dan warisan budaya mereka. Strategi ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal pemberdayaan, pelestarian budaya, dan pembangunan berbasis karakter lokal. Ketika masyarakat diberdayakan untuk mengenali, mencintai, dan mengembangkan potensi lokalnya sendiri, maka kemandirian ekonomi bukan lagi menjadi cita-cita yang jauh, melainkan menjadi kenyataan yang tumbuh dari kegiatan itu sendiri.

#### 5. Partisipasi dan Kolaborasi Multisektor

Partisipasi dan kolaborasi multisektor menjadi strategi krusial yang mampu menyinergikan peran dan kontribusi dari berbagai aktor yakni pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi (akademisi), dan sektor swasta. Kerja sama ini merupakan pondasi dari pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan partisipatif. Sinergi antara pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor swasta memperkaya sumber daya, pendekatan, dan inovasi dalam membangun kemandirian ekonomi lokal. Lebih dari sekadar kerja sama teknis, kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong lintas batas yang menjadikan pembangunan sebagai tanggung jawab bersama. Dengan membangun ekosistem kolaboratif yang kuat, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi agenda program, tetapi gerakan kolektif menuju transformasi sosial dan ekonomi yang lebih adil dan mandiri.

#### **Dampak Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kemandirian Ekonomi Lokal**

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat akan menimbulkan dampak yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi. Salah satunya adalah peningkatan pendapatan dan taraf hidup, di mana usaha mikro dan kecil yang dikelola oleh masyarakat setempat mampu menjadi sumber utama penghasilan yang mendukung kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, pemberdayaan turut mendorong terbukanya lapangan kerja di tingkat lokal, sehingga mengurangi arus migrasi ke kota besar serta menekan ketergantungan pada wilayah urban sebagai pusat ekonomi.

Lebih lanjut, inisiatif ekonomi berbasis komunitas seperti koperasi atau kelompok usaha bersama dapat memperkuat ekonomi kolektif masyarakat, menumbuhkan semangat gotong royong, dan meningkatkan efisiensi usaha melalui kerja sama yang berkelanjutan. Pemberdayaan yang efektif juga menciptakan kemandirian dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi, di mana masyarakat memiliki kendali atas pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, nilai-nilai, serta budaya lokal mereka.

Tak kalah penting, pendekatan ini membentuk ketahanan ekonomi yang lebih kuat terhadap gejolak pasar global. Ketika masyarakat mengandalkan kekuatan ekonomi lokal yang tidak sepenuhnya bergantung pada dinamika pasar dunia, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dan krisis ekonomi yang datang dari luar.

#### **Tantangan dan Hambatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal**

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari beberapa tantangan berikut:

##### 1. Ketimpangan Informasi dan Pendidikan

Ketimpangan informasi dan pendidikan merupakan tantangan multidimensional yang menghambat proses pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan ini memperkuat eksklusi sosial, memperlebar jurang ketidaksetaraan, dan menghambat masyarakat miskin untuk keluar dari siklus kemiskinan. Akses yang terbatas terhadap informasi dan pendidikan menyebabkan masyarakat miskin kesulitan dalam meningkatkan kapasitas diri, memperjuangkan hak-haknya, dan membangun kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk membangun sistem informasi dan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Dengan memperkecil ketimpangan ini, pemberdayaan masyarakat akan menjadi lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, serta mampu mendorong transformasi sosial yang lebih adil dan merata.

## 2. Budaya Ketergantungan

Budaya ketergantungan merupakan tantangan tersembunyi dalam proses pemberdayaan masyarakat, terutama dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi yang sejati. Ketergantungan yang berkepanjangan terhadap bantuan eksternal menyebabkan masyarakat kehilangan daya juang, kreativitas, dan tanggung jawab atas pembangunan dirinya sendiri. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan harus diarahkan pada perubahan paradigma, dari masyarakat penerima menjadi masyarakat pelaku dan penggerak. Dibutuhkan pendekatan yang berorientasi pada partisipasi aktif, pendidikan kritis, penguatan kapasitas, dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat untuk mengambil peran utama dalam menentukan masa depannya. Dengan demikian, kemandirian bukan hanya menjadi tujuan, tetapi juga menjadi proses pembelajaran sosial yang membangun harga diri, solidaritas, dan keberdayaan kolektif masyarakat.

## 3. Lemahnya Kelembagaan Lokal

Lemahnya kelembagaan lokal merupakan salah satu akar persoalan dalam kegagalan banyak program pemberdayaan masyarakat. Ketika lembaga lokal tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan transparan, maka potensi lokal yang besar sekalipun sulit dimobilisasi secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan harus menjadi fokus utama dalam strategi pemberdayaan. Ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembentukan sistem tata kelola yang akuntabel, serta pendampingan kelembagaan yang berkelanjutan. Transparansi dan partisipasi anggota harus menjadi prinsip dasar, agar lembaga menjadi milik bersama dan dapat berjalan secara demokratis. Dengan kelembagaan yang kuat, masyarakat akan memiliki alat kolektif yang mampu mengorganisir potensi ekonomi, menjalin kerja sama strategis, serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

## 4. Kurangnya koordinasi antar Stakeholder

Kurangnya koordinasi antar stakeholder merupakan hambatan serius dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Tumpang tindih program, duplikasi kebijakan, serta minimnya integrasi antar-instansi mengindikasikan lemahnya sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan. Tanpa koordinasi yang baik, potensi sumber daya yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan dapat menimbulkan konflik kebijakan dan pemborosan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas, sistem komunikasi yang terbuka, serta komitmen lintas sektor untuk membangun kolaborasi yang sinergis dan berbasis data. Forum koordinasi rutin, peta program terpadu, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap program benar-benar saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama yaitu kemandirian ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat memegang peranan yang penting dalam upaya membangun kemandirian ekonomi lokal. Karena kemandirian ekonomi lokal tidak akan tercapai tanpa proses pemberdayaan yang terarah dan inklusif. Masyarakat yang diberdayakan akan memiliki kemampuan untuk mengenali potensi lokal, mengembangkan keterampilan produktif, mengakses sumber daya ekonomi, dan mengambil keputusan secara kolektif.

Pemberdayaan masyarakat adalah kunci strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan. Melalui strategi yang efektif seperti peningkatan kapasitas SDM (pelatihan keterampilan teknis, pengembangan kemampuan manajerial, pendidikan kewirausahaan, dan pelatihan pengelolaan keuangan), akses terhadap sumber daya (modal, teknologi, dan pasar), penguatan kelembagaan ekonomi lokal, pengembangan potensi lokal, serta partisipasi dan kolaborasi multisektor, masyarakat tidak hanya mampu mengelola sumber daya ekonominya secara mandiri, tetapi juga membangun struktur sosial dan kelembagaan yang kuat dan tangguh. Kemandirian ekonomi yang lahir dari pemberdayaan ini menjadi pondasi penting bagi pembangunan nasional yang merata, adil, dan inklusif, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi di lingkungannya sendiri.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat akan menimbulkan dampak yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, meliputi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja lokal, penguatan ekonomi komunitas, kemandirian dalam pengambilan

keputusan ekonomi, serta ketahanan terhadap krisis ekonomi global. Selain dampak dari pemberdayaan masyarakat, ada juga terdapat beberapa tantangan dalam pemberdayaan masyarakat, seperti ketimpangan informasi dan pendidikan, budaya ketergantungan, lemahnya kelembagaan lokal, dan kurangnya koordinasi antar stakeholder.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

- Achmad, W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: e-ISSN: 2809-8862 Membangun Kemandirian Willya Achmad. *Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan*, 14(9).
- Adlan, M. A. (2024). *Kemandirian ekonomi organisasi melalui potensi ekonomi lokal pada pimpinan anak cabang gerakan pemuda ansor kecamatan bandung kabupaten tulungagung*. 12(01), 1–21.
- Asnuryati. (2023). Strategi Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan di Desa: Mendorong Pemberdayaan Komunitas dan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 2175–2183.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>
- Febrianty, N. D. (2024). Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Penguatan Kemandirian Ekonomi Pesantren:(Studi Pada Pondok Pesantren Trubus Iman). *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(1), 28–39.
- Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas: Review Literatur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 132–146. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.196>
- Halil, H. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. *Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 99–112. <https://doi.org/10.47766/ibrah.v1i2.1024>
- Hamdan, H. (2018). INDUSTRI 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 3(2), 1. <https://doi.org/10.29407/nusamba.v3i2.12142>
- Hawa, S., Sokarina, A., & Suryantara, A. B. (2022). Peran Bumdes Maria Maju Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 235–243. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i2.123>
- Hidayatullah, F. A., & Suminar, T. (2021). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Candi Plaosan Melalui Program Desa Wisata Untuk Kemandirian Ekonomi Di Desa Bugisan Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten. *Lifelong Education Journal*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.59935/lej.v1i1.4>
- Hilmi Nur Huda Al Mubaroq, Nihayatus Sholichah, & Widyawati. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Lokal melalui Pengelolaan Desa Wisata di Desa Panglipuran, Bali untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 103–119. <https://doi.org/10.61404/jimi.v3i1.363>
- Karsidi, R. (2002). Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan Kecil. *Semiloka Pemberdayaan Masyarakat Di Jawa Tengah Dalam Rangka Pelaksanaan Otoda, Badan Pemberdayaan Masyarakat Jateng, Di Semarang 4-6 Juni 2002*, 1–11.
- Lusa, H., & Supriatna, I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Workshop Ekonomi Kreatif Berbasis Promosi Online Olahan Singkong Di Ukm Kelompok Tani Genting Jaya Bengkulu Utara. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(4), 361. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v4i4.701>
- Mala, I. W., Misnan, & Setianingsih S, E. (2024). Membangun Kemandirian Ekonomi Lokal Masyarakat Desa melalui Pemberdayaan Usaha Bersama Komunitas (UBK). *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(2), 186–200.

<https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i2.8655>

- Mulyadi, M. (2017). Mewujudkan Kemandirian Lokal Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lorong Di Kota Makassar. *JURNAL Kebijakan Pembangunan*, 12(2), 179–188.
- Munjiat, I. H., Juliani, P., Marini, Rizqa Alamri, A., Ester Kolanus, L., & Widya Astuti, C. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Melalui Produksi Kain Tenun di. *Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 13(2), 163–177.
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku .... *J-3P (Jurnal Pembangunan ...)*, 137–149.
- Pangestuti, E., Furqon, M. T., Hanifa, ), & Ramadhan, M. (2018). Peta Potensi Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Desa (Studi pada Desa Tawang Argo, Kabupaten Malang ) Inggang Perwangsa Nuralam 2 ). *Journal of Applied Business Administration*, 2(2), 2548–9909.
- Ristanti, R., Anwar, C., Arifuddin, M. R., Nuraini, K., & Niharo, N. S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Kemandirian dan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal. *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(1), 77–82. <https://doi.org/10.55732/ncer.v3i1.1379>
- Septiya Fahmi Rezi, L., & Ali, I. (2024). Analisis Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kemandirian Ekonomi Desa: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Seminar Nasional Lppm Ummat*, 3(0), 579–590.